

**“PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH, KOMPLEKSITAS,
DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur)

Oleh:

Meli Marlani¹⁾, Moh. Amin²⁾, M. Cholid Mawardi²⁾
1)Alumni FEB Unisma;2) Dosen Tetap FEB Unisma;

Email: melidakwansyah@gmail.com

ABSTRACT

Effect simultaneously and partially the characteristics of government proxied with (regional wealth (PAD), level of dependency, total assets, age of local government), and government complexity proxied by (number of SKPD, legislative size) as well as audit findings on the level of disclosure of District / Municipal Government Financial Statements in East Java Province period 2016.

Population used in this research is financial report of regency / municipality government in East Java Province which has been audited by BPK for period 2016. The sample selection using purposive sampling. Based on the criteria, obtained 38 government City / Regency which become sample in this research. The method used in this study using multiple linear regression method.

Based on the results of the analysis can be put forward several conclusions as follows: 1) F test results show that simultaneously the characteristics of government proxied with (regional wealth (PAD), of District / City Government Finances Report in East Java period 2016. This is indicated by the significance value of F below 0.05 of 0.007. 2) partially PAD, DEPEND, AGE, SKPD and AUDIT have no significant effect on disclosure level of financial statement, while ASSET variable has positive significant effect and LEG variable has significant negative effect to disclosure level of financial information (DISC).

Keywords: PAD, DEPEND, AGE, SKPD, AUDIT, ASSET, LEG, DISC

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

“Sektor publik dapat diartikan sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik (Mardiasmo, 2002 dalam khasanah, 2014). Dalam memenuhi hak publik, pemerintah dituntut untuk transparansi dalam berbagai aspek terutama aspek keuangan yang dirasa cukup sensitive”

“Untuk menjawab keraguan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah, maka di perlukan laporan keuangan sebagai bukti operasional daerah dan sekaligus tolak ukur kinerja daerah serta sebagai bahan evaluasi. Untuk memenuhi tujuan tersebut laporan keuangan harus menyajikan secara lengkap (*full disclosure*) informasi yang dibutuhkan oleh pengguna baik pada halaman muka (*on the face*) maupun dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)”

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah secara simultan karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan (kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah), dan kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan (jumlah SKPD, ukuran legislative), serta temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016 ?
2. Apakah secara parsial karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan (kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah), dan kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan (jumlah SKPD, ukuran legislative), serta temuan audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016 ?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan (kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah), dan kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan (jumlah SKPD, ukuran legislative), serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016.
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial karakteristik pemerintah yang diproksikan dengan (kekayaan daerah (PAD), tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah), dan kompleksitas pemerintah yang diproksikan dengan (jumlah SKPD, ukuran legislative), serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi, terutama akuntansi sektor publik, berkaitan dengan tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Pemerintah Terkait

Menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pengungkapan laporan keuangan yang dilaporkan telah sesuai dengan Peraturan SAP yang berlaku.

b. Bagi Pemerintah Pusat

Menjadi dasar evaluasi, masukan dan pertimbangan untuk pemerintah agar bisa menentukan penilaian atau bahkan punishment dan reward yang bisa diterapkan dalam hal pengungkapan wajib sesuai SAP yang harus dilakukan pemerintah daerah.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1.5. *Theory Stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu seperti materi dan uang tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Raharjo, 2007). Teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang dimana para penerima amanah (*steward*) termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pihak pemberi amanah (*principal*), selain itu perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya

1.6. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Definisi laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah

“Penyusunan dan penyajian LKPD dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintah. LKPD disajikan dengan dilampiri ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah. Selanjutnya LKPD disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan. LKPD yang telah diaudit BPK, selanjutnya disampaikan ke DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dengan peraturan daerah (perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD”

1.7. Kekayaan Daerah

1.8. Temuan Audit

“Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”

1.9. Ukuran SKPD

“Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Pembuatan laporan keuangan yang dilakukan masing-masing SKPD akan dikonsolidasikan oleh SKPKD untuk menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten” (Khasanah, 2014)

1.10. Karakteristik Pemerintah Daerah

“Karakteristik pemerintah daerah adalah ciri-ciri khusus yang terdapat pada suatu pemerintah daerah, menandai dan membedakannya dengan daerah lain (Yulianingtyas dan Suhardjanto, 2011). Komponen dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik sebuah daerah”

1.11. Hipotesis

- H₁ : Secara simultan, berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
- H_{1a} : Secara parsial, kekayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
- H_{1b} : Secara parsial, tingkat ketergantungan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
- H_{1c} : Secara parsial, total asset berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
- H_{1d} : Secara parsial, umur pemerintahan berpengaruh
- H_{1e} : Secara parsial, berpengaruh laporan keuangan pemerintah.
- H_{1f} : Secara parsial, ukuran legislaif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah.
- H_{1g} : Secara parsial, berpengaruh.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

“Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Eksperimental. Penelitian ini dilakukan pada laporan keuangan pemerintahan daerah kota/kabupaten se Jawa Timur. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2017 sampai Februari 2018”

2.2. Populasi dan Sampel

“Populasi dalam hal penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan dari kota/kabupaten di Jawa timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bersumber dari BPK RI. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode *purposive sampling*” Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota pada tahun 2016 yang telah diaudit oleh BPK.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada periode tahun 2016.
2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang terdapat di Jawa timur periode tahun 2016.

2.3. Variabel Penelitian

“Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah. Variabel independen dalam penelitian ini adalah karakteristik pemerintah (kekayaan daerah/PAD, tingkat ketergantungan, total aset, umur pemerintah daerah), kompleksitas pemerintah (jumlah SKPD, ukuran legislatif), dan temuan audit”

2.4. Definisi Operasional Variabel

Tingkat Pengungkapan Informasi (*Disclosure Level*)

Instrument pengukuran pengungkapan informasi yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *index Wallace*.

$$DI = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{Total item pengungkapan}}$$

Kekayaan Daerah (PAD)

“PAD digunakan karena perannya, yang walaupun kontribusinya tidak terlalu besar terhadap total kekayaan pemerintah daerah secara keseluruhan, namun PAD merupakan satu-satunya sumber yang keuangan yang berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan asli daerah”

$$PAD = Ln (PAD)$$

Tingkat Ketergantungan

“Menurut Ardhani (2011) dalam Sudarsana (2013), Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan transfer yang sifatnya umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah sebagai upaya mengatasi ketimpangan horizontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah”

$$DEPEND = \frac{DAU}{\text{Total Pendapatan}}$$

Total Asset

“Dalam beberapa penelitian di bidang pemerintahan (Sumarjo, 2010; Hilmi, 2010; Lesmana, 2010; Syafitri, 2012; dan Sudarsana, 2013), total aset digunakan sebagai proksi untuk variabel ukuran pemerintah daerah. Begitu pula dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan

variabel total aset. Total aset lebih sering digunakan karena nilai aset dianggap lebih stabil”

$$\text{Total Asset} = \text{Ln} (\text{Total Asset})$$

Umur Pemerintah Daerah

“Penggunaan umur pemerintah daerah berdasarkan hari jadi daerah terkait dalam mengukur umur pemerintah daerah memiliki asumsi bahwa umur berdasar hari jadi tetap bisa memenuhi definisi dari umur yaitu tetap bisa menggambarkan lamanya daerah tersebut telah berdiri”

$$\text{AGE} = 2016 - (\text{Hari jadi daerah})$$

Jumlah SKPD

“Sejalan dengan penelitian Hilmi (2010) dan Yulianingtyas (2011), penelitian ini menggunakan ukuran total seluruh SKPD yang terdapat dalam suatu daerah untuk mengukur variabel jumlah SKPD”

$$\text{SKPD} = \text{Jumlah SKPD}$$

Ukuran Legislatif

“DPRD merupakan suatu lembaga perwakilan rakyat yang memiliki fungsi pengawasan terutama dalam hal pengawasan keuangan daerah. Sehingga diharapkan dengan semakin banyaknya anggota DPRD akan semakin meningkatkan pengawasan yang berujung pada peningkatan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat”

$$\text{LEG} = \text{Jumlah anggota DPRD}$$

Temuan Audit

“Temuan audit yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada penelitian Hilmi (2010) yaitu dengan menggunakan jumlah temuan audit pemeriksaan BPK atas ketidakpatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai proksi dalam mengukur temuan audit”

$$\text{FIND} = \text{Jumlah Temuan Audit}$$

2.5.Sumber dan Metode Pengumpulan Data

“Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan pemerintahan daerah yang telah di audit BPK untuk periode 2016. Data tersebut adalah laporan keuangan pemerintah daerah dan laporan hasil pemeriksaan BPK atas pemerintah daerah kabupaten/kota, selain itu data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berasal dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan sumber lain yang terkait”

2.6.Metode Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata, deviasi standar, nilai minimum, dan nilai maksimum.

2. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian normalitas data dan asumsi klasik. Hal ini dilakukan agar data

sampel yang diolah dapat benar-benar mewakili populasi secara keseluruhan.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

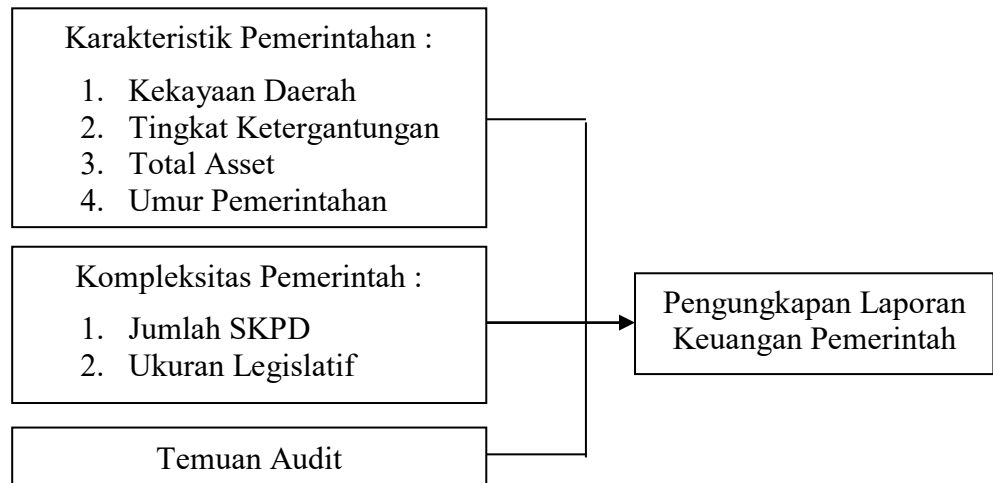
Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Regresi Linear Berganda. Dan persamaan regresinya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

4. Uji Hipotesis

Untuk mengetahui signifikansi dari hipotesis dalam penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai berikut : Uji F, Koefisien Determinasi (R^2), Uji t.

2.7. Model Penelitian



Gambar 3.1 Model Penelitian

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Gambaran Umum Sampel Penelitian

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 38 laporan keuangan pemerintah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1
Sampel Penelitian**

Keterangan	Jumlah
Laporan keuangan PEMDA JATIM 2016	38
Laporan keuangan PEMDA JATIM 2016 yang tidak di audit BPK.	(0)
Laporan keuangan PEMDA JATIM 2016 yang tidak lengkap	(0)
Laporan keuangan PEMDA JATIM 2016 yang mendapat opini selain WTP dan WDP	(0)
Jumlah Sampel	38

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Statistik Deskriptif

Statistik Descriptive Variabel

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y (DISC)	38	.2941	.8235	.571195	.1114451
X1 (PAD)	38	23.8943	29.0396	2.629285	.8040625
X2 (DEPEND)	38	.1807	.5980	.486368	.0771897
X3 (ASSET)	38	28.0338	31.2721	2.880397	.5562091
X4 (AGE)	38	1.0986	7.1357	5.771013	1.2638938
X5 (SKPD)	38	2.5649	4.0431	3.141982	.4070362
X6 (LEG)	38	3.2189	3.9120	3.763326	.2223054
X7 (AUDIT)	38	.0000	4.0000	.526316	1.1327279
Valid N (listwise)	38				

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

3.2. Hasil Pengujian Statistik Inferen dan Pengujian Hipotesis

“Hasil uji normalitas terhadap masing-masing model regresi mempunyai nilai *Asymp. Sig. (2-tailed) > Level Of Sifnifican ($\alpha = 5\%$)* sehingga model regresi variabel pengganggu atau *residual* dinyatakan berdistribusi normal”

Uji Asumsi Klasik

“Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini menggunakan uji autokorelasi, serta uji heteroskedastisitas, uji multikolinieritas”

1. Uji Multikolinieritas

Metode yang dapat digunakan dalam menguji adanya multikolonieritas adalah dengan menentukan nilai VIF (*Variane Inflation Factors*).

2. Uji Autokolerasi

“Pengujian asumsi autokorelasi dilakukan menggunakan uji *Durbin Watson*. Kriteria pengujian menyatakan apabila nilai uji *Durbin Watson* (dW) berada pada $dU < dW < (4-dU)$ maka persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi atau residual tidak saling berkorelasi atau berhubungan. Kriteria pengujian autokorelasi dapat dilihat melalui tabel berikut”

dL	4-dL	dU	4-dU	dW	Interpretasi
1,9394	2,0606	1,0879	2,9121	2,101	Tidak terjadi autokorelasi

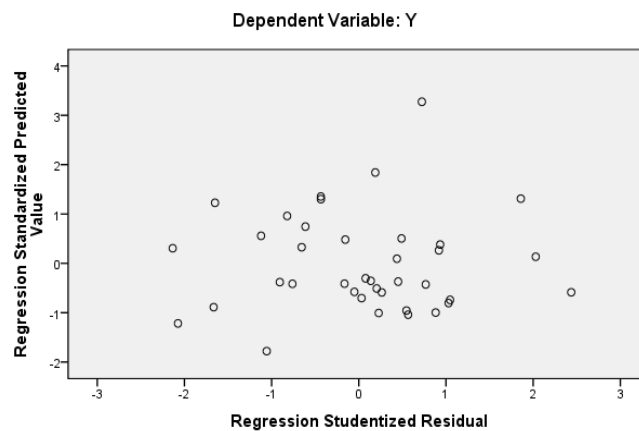
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Berdasarkan hasil analisis terhadap masing-masing model yang ditunjukkan pada tabel 4.4 diatas diketahui bahwa nilai *Durbin* berada diantara $dU < dW < (4-dU)$, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada model regresi yang terbentuk.

3. Uji Heteroskedastisitas

“Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.”

Adapun grafik hasil pengujian heteroskedastisitas model regresi menggunakan *SPSS IBM V.20 for Windows*



Gambar 4.1 Grafik *Scatterplot* model ke- 1

“Hasil analisis pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan dalam penyebarannya tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas pada model yang diuji, sehingga asumsi ini terpenuhi”

Uji Hipotesis

1. Uji Simultan (Uji F)

Jika nilai Signifikansi $F > \alpha = 0,05$, maka H_0 di terima H_1 di tolak artinya secara simultan tidak terdapat $F < \alpha = 0,05$, maka H_0 di Tolak dan H_1 diterima artinya secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.6
Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.150	7	.021	12.082	.007 ^a
	Residual	.309	30	.010		
	Total	.460	37			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2018

Tabel 4.6 menunjukkan nilai *Signifikansi* $F < 0,05$ ($0,007 < 0,05$) sehingga H_1 diterima. Hal ini dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel PAD, DEPEND, ASSET, AGE, LEG, SKPD, dan AUDIT berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Informasi (DISC).

2. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

“Nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dengan nilai *R-square*. Nilai *R-square* dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (independen) dalam menerangkan variabel terikat (dependen)”

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.572 ^a	.327	.170

Dari tabel 4.7 diketahui bahwa *R Square* sebesar 0,327. Hal ini berarti sebesar 32,70% Tingkat Pengungkapan Informasi (DISC) dipengaruhi oleh PAD, DEPEND, ASSET, AGE, LEG, SKPD, dan AUDIT. Sedangkan sisanya 67,30% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian.

3. Uji Statistik t

1. Nilai t hitung variabel PAD sebesar 1,017 dengan signifikansi sebesar 0,317. Karena $\text{sig. } t > 5\%$ ($0,317 > 0,050$) sehingga H_{1a} ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DISC.
2. Nilai t hitung variabel DEPEND sebesar 2,019 dengan signifikansi sebesar 0,053. Karena $\text{sig. } t > 5\%$ ($0,053 > 0,050$) sehingga H_{1b} ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa DEPEND tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DISC.
3. Nilai t hitung variabel ASSET sebesar 2,658 dengan signifikansi sebesar 0,012. Karena $\text{sig. } t < 5\%$ ($0,012 < 0,050$) sehingga H_{1c} diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ASSET berpengaruh secara signifikan positif terhadap DISC.
4. Nilai t hitung variabel AGE sebesar -0,022 dengan signifikansi sebesar 0,982. Karena $\text{sig. } t > 5\%$ ($0,982 > 0,050$) sehingga H_{1d} ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa AGE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DISC,
5. Nilai t hitung variabel SKPD sebesar -0,224 dengan signifikansi sebesar 0,824. Karena $\text{sig. } t > 5\%$ ($0,824 > 0,050$) sehingga H_{1e} ditolak, maka dapat disimpulkan

bahwa PAD tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DISC.

6. Nilai t hitung variabel LEG sebesar -2,224 dengan signifikansi sebesar 0,034. Karena $\text{sig. } t < 5\%$ ($0,034 < 0,050$) sehingga H_{1f} diterima, maka dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh secara signifikan negative terhadap DISC.
7. $> 5\%$ ($0,765 > 0,050$) sehingga H_{1g} ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa AUDIT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap DISC.

Model regresi yang dapat dibuat berdasarkan hasil analisis diatas adalah:

$$\text{DISC} = -4,439 + 0,041 \text{ PAD} + 0,805 \text{ DEPEND} + 0,157 \text{ ASSET} + 0,000 \text{ AGE} - 0,011 \text{ SKPD} - 0,249 \text{ LEG} - 0,005 \text{ AUDIT} + e$$

3.3. Pembahasan Hasil Penelitian

“Berdasarkan model hasil pengujian tabel 4.6 menunjukkan bahwa secara simultan PAD, DEPEND, ASSET, AGE, SKPD, LEG, dan AUDIT berpengaruh signifikan terhadap tingkat *disclosure* dengan demikian hipotesis pertama diterima. Penelitian ini sejalan dengan teori peneliti sebelumnya, yang dilakukan oleh Hilmi (2010), Syafitri (2012), Khasanah dan Shiddiq (2014) serta penelitian Pandansari (2016)”

“Variabel PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan, teori *stewardship* mengatakan bahwa pemerintah daerah akan berusaha menunjukkan tanggungjawab atas kinerjanya yang baik melalui hasil kekayaan yang besar dan sumber daya yang banyak sehingga berupaya mengungkapkannya dengan lebih baik pada laporan keuangannya. Namun dalam sudut pandang yang lain, jumlah kekayaan yang besar juga dapat menjadi tolok ukur kinerja pihak manajemen yang cenderung buruk dalam melakukan manajemen atas aset yang dimiliki, maka dasar inilah yang menjadi penyebab mengapa PAD tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi pada laporan keuangan pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khasanah dan Shiddiqi (2014)”

“Variabel DEPEND tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan laporan keuangan. Tidak adanya ketergantungan yang besar ini memungkinkan pemerintah pusat untuk melakukan otonomi terhadap pemerintah daerah (kota/kabupaten). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2010), serta Khasanah dan Shiddiqi (2014), yang menemukan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah tidak berhubungan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah”

“Variabel LEG berpengaruh signifikan negative terhadap tingkat pengungkapan informasi. Winarna dan Murni (2007) menyatakan bahwa

lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis dalam pengawasan keuangan daerah. Semakin besar jumlah anggota legislatif maka diharapkan akan semakin besar tingkat pengawasan yang dilakukan oleh anggota legislatif. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Khasanah dan Shiddiqi (2014), namun bertentangan dengan Penelitian Syafitri (2012) dan Yulianingtyas (2011) yang menemukan bahwa jumlah anggota legislatif atau DPRD berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan. Peranan DPRD sebagai pengawas keuangan berjalan dengan baik sehingga dapat mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007)”

“Variabel AUDIT tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi. Jumlah temuan audit BPK tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan lebih besar. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hilmi (2010), namun berbeda dengan Liestiani (2008) yang menemukan bahwa jumlah temuan audit berhubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pengungkapan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan keuangannya”

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan PAD, DEPEND, ASSET, AGE, SKPD, LEG dan AUDIT berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi. Sedangkan secara parsial PAD, DEPEND, AGE, SKPD dan AUDIT berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi, sedangkan variabel ASSET berpengaruh positif signifikan serta variabel LEG berpengaruh negative signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan (DISC).

1.2. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian menggunakan tujuh variabel bebas.
2. Periode pengamatan satu tahun, yaitu tahun 2016.
3. Sampel yang digunakan pada penelitian ini PEMDA JATIM, sehingga tidak bisa dijadikan generalisasi untuk seluruh perusahaan.

1.3. Saran

Saran yang diberikan berdasarkan hasil analisis, pembahasan, keterbatasan penelitian, dan simpulan adalah:

1. Peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian dengan menambah jumlah variabel bebas.
2. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat, peneliti berikutnya dapat menambah periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. 2004. Perilaku *Oportunistik Legislatif* dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan *Principal-Agency Theory*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Bastian, I. 2006. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI. 2016. *Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pusat: BPK RI.<http://www.bpk.go.id>.
- Bennet, R. 2010. *Decentralizing Authority After Suharto: Indonesia's Big Bang, 1998-2010. Innovations for Successful Societies. Jurnal Princeton University, Pp: 1-11.*
- Daniri, Mas Ahmad. 2005. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta. Ray Indonesia
- Gujarati, Damodar. 2006. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Choiriyah, Umi. 2010. *Informatiaon GAP Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Skripsi. FE.UNS. Surakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate DENGAN Program IBM SPSS 19 (edisi kelima)*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, I. dan A. Chariri. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Greiling, Dorothea. 2005. *Performance Measurement in the Public Sector: the German Experience. International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 54, pp: 7.*
- Ghozali, I. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hilmi, A. Z., dan D. Martani. 2012. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi XV. Banjarmasin*.
- Hilmi, A.Z. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Jurnal A SPAK* No.17, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Depok.
- Kawedar, Warsito (2010). *Opini Audit dan Sistem Pengendalian Intern*. FEB UNDIP. Semarang
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage*, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Skripsi. FE UNNES. Semarang.

- Khasanah. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SKRIPSI. UNDIP.
- Khasanah, L NurShiddiq Rahardjo. 2014. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012). Skripsi FEB Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nazaruddin, Ietje. dan Agus Tri Basuki. 2016. Analisis Statistik dengan SPSS. Yogyakarta: Danisa Media.
- Maulana, Candra. "Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/ Kota yang terdapat di Pulau Jawa tahun 2013)". Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Semarang, 2015.
- Mardiasmo. 2002. Elaborasi reformasi akuntansi sektor publik: telaah kritis terhadap upaya aktualisasi kebutuhan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 6 (1): 63-82
- Mulyadi. (2002). Auditing. Buku 1, edisi Enam, Jakarta: Salemba Empat.
- Modebe, N.J., Regina G. Okafor, J.U.J Onwumere and Imo G. Ibe. 2012. Impact of Recurrent and Capital Expenditure on Nigeria's Economic Growth. *European Journal of Business and Management*, 4 (19), pp: 66-74.
- Pandansari. 2016. Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, Dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. SKRIPSI. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
- Peraturan Pemerintah RI No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Peraturan Mendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Penthury, M.A. 2011. *Flypaper Effects Anomaly Of West Papua Capital Public Expenditure. Economic Journal Of Emerging Markets*, 3 (3), pp: 289-297.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*

- Rahayu. 2016. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas, Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel *Moderating* Pada Lkpd Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan. SKRIPSI, UIN Alauddin Makassar
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan *Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. Vol. 2 No. 1 Juni 2007:37-46*
- Robbins, WA Dan Austin, KR. “kualitas Pengungkapan dalam laporan keuangan pemerintah: penilaian terhadap kesesuaian ukuran senyawa”. *Jurnal Riset Akuntansi. Vol. 24 No2, 1986.*
- Raharjo, Eko. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi. Vol. 2 No. 1 Juni 2007:37-46
- Sinaga, Yurisca F. & Prabowo, Tri Jatmiko W. “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah”. *Jurnal Universitas Diponegoro. 2011.*
- Setyaningrum dan Syafitri (2012). *Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Desember, Vol. 9, No. 2, 2014.*
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.*
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. ‘*Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan*